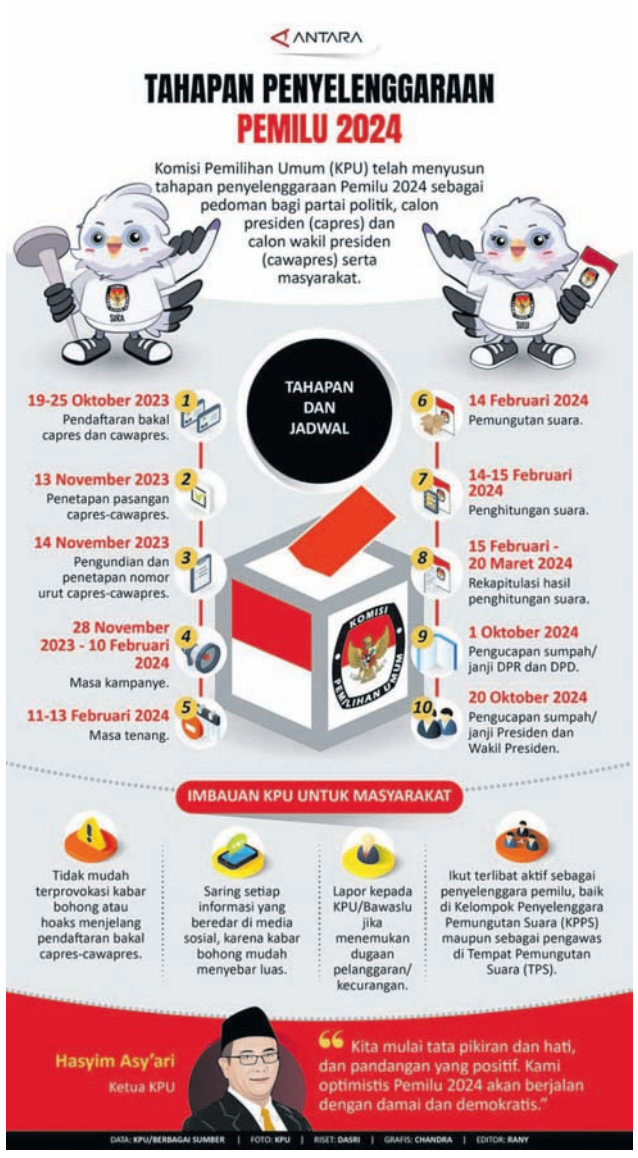

Presiden Jokowi 'Groundbreaking' Bandara VVIP IKN pada 1 November

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meletakkan batu pertama atau "groundbreaking" pembangunan bandara Very Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 1 November mendatang.

"Sudah siap. Tanggal 1 mungkin, 1 November," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/10).

Basuki menjelaskan peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan Bandara VVIP di IKN itu sudah siap dilaksanakan. Peletakan batu pertama dilaksanakan setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat pada akhir Oktober.

Dengan terbangunnya Bandara VVIP, Basuki berharap investor akan lebih cepat masuk menuju IKN, mengingat bandara tersebut menjadi akses langsung ke IKN. "Ya lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," kata dia.

ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa
Basuki Hadimuljono

Selain melakukan peletakan batu pertama, Presiden Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan IKN. Meski tidak dirinci, Basuki menjelaskan progres pembangunan IKN kini sudah lebih dari 30 persen.

Dilansir dari laman LPSE Kementerian PUPR, nilai paket konstruksi fisik pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP IKN (sisi landasan udara) mencapai Rp4,28 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Bandara VVIP IKN memiliki runway 3.000 x 45 meter dan mampu didarati pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300 ER dan Airbus A380.

Adapun kapasitas apron mampu menampung tiga pesawat berbadan besar (Wide Body), ditambah satu pesawat berbadan kecil (Narrow Body); atau tujuh pesawat berbadan kecil (Narrow Body), serta kapasitas helipad menampung tiga helikopter. **(ANTARA)**

HOTLINE ANTARA 0812-8825-9462

Kemenko PMK Minta Pemda Lebih Fokus Tangani Penurunan Stunting

KOTA BANDUNG - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk fokus melaksanakan program percepatan penurunan stunting guna mencapai target penurunan menjadi 14 persen pada tahun 2024

"Pemda untuk mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat provinsi hingga desa, yang dimulai dari proses perencanaan hingga implementasi dan monitoring agar intervensi tepat sasaran," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Satya Sananugraha di Bandung, Jawa Barat, Senin (23/10).

Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya mempercepat penurunan stunting dengan meminta dukungan mulai dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait hingga pemda untuk mewujudkan target penurunan stunting di angka 14 persen pada 2024. "Saya mengharapkan dengan sisa waktu tinggal 14 bulan untuk fokus pada indikator yang cakupannya masih jauh dari target dan perlu dukungan dari semua pihak," ujarnya.

ANTARA/Rubby Jovan
Satya Sananugraha

Untuk mendukung hal tersebut, Satya mengatakan Kemenko PMK telah melakukan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di 14 provinsi dalam rangka memberikan dukungan penguatan kepada pemda. "Kemenko PMK bersama 19 K/L terkait melakukan evaluasi secara terpadu dengan kriteria provinsi yang prevalensi stuntingnya masih sangat tinggi," kata Satya.

Ia mengatakan dalam penanganan penurunan stunting di 14 provinsi tersebut mencakup 70 persen sasaran, atau sekitar 3,3 juta balita mampu dioptimalkan penanganannya. **(ANTARA)**

FOTO CERITA

Mandiri Menuai Matahari

"AKU bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri bunga beraneka. Mahligai rama-rama, bertajuk cahya jingga. Surya di cakrawala".

Makna mendalam terkandung dalam lagu Zamrud Khatulistiwa karya Guruh Soekarno Putra yang dipopulerkan mendiang penyanyi legendaris Chrisye. Melalui lagunya, Guruh mengungkapkan rasa syukur atas kekayaan alam Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa ini. Rasa syukur sebagai negara yang berada di garis lintang nol derajat rupanya benar-benar dialami oleh sejumlah warga pengguna pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap off grid atau sistem yang tidak terhubung jaringan listrik utama PLN. Sinar matahari yang merata sepanjang tahun khas negara tropis seperti di Indonesia ini tidak mereka sia-siakan untuk dikonversikan menjadi energi listrik penyokong kehidupan sehari-hari.

Seorang warga Kapuk, Jakarta Barat, Nur Rohmandi, telah menjadi pengguna PLTS atap off grid sejak 2019 untuk kebutuhan listrik di rumah dan bengkel elektroniknya. Berawal dari coba-coba dengan bermodal panel surya bekas sebesar 10 watt peak (wp) yang dibeli dari kawannya dan baterai rakitan sederhana, Nur mulai memanfaatkan PLTS untuk memasok listrik pada lampu penerangan rumahnya.

Bukan hal mudah bagi Nur Rohmandi untuk menjadi pengguna PLTS atap off grid. Harga komponen-komponen baru PLTS yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah tersebut awalnya dirasa berat. Akan tetapi, hal itu tidak menghalangi Nur dalam mengembangkan pemanfaatan PLTS. Dia menyiasatinya dengan memasang komponen-komponennya secara mencicil dan sebagian dibeli dari barang bekas yang pastinya berharga lebih murah.

Kini setelah hampir lima tahun, Nur telah menginvestasikan uangnya untuk komponen-komponen PLTS off grid tidak kurang dari Rp10 juta. Usaha Nur tidak sia-sia. Efisiensi demi efisiensi terus dia tuai. Dari tagihan listrik PLN yang biasa dibayar Rp 300.000-Rp 400.000 per bulan, kini dia bisa menghemat hingga 50 persen. Bahkan, bengkel elektronik miliknya kini sepenuhnya menggunakan PLTS sebagai pemasok listrik sehari-hari.

Berbeda dengan Nur Rohmandi, seorang warga Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Yohanes Bambang Sumaryo mengawali penggunaan PLTS secara on grid (sistem PLTS terhubung dengan jaringan listrik utama PLN) pada 2014. Karena keterbatasan PLTS sistem on grid yang tidak bisa secara bebas menambah kapasitas produksi, mulai 2020 Yohanes memutuskan untuk mengalihkan sistem PLTS-nya dari on grid menjadi sistem off grid. Selain itu, dengan mengalihkannya menjadi sistem off grid maka listrik dari PLTS atap Yohanes pun bisa dimanfaatkan dalam 24 jam.

"Saat masih on grid, listrik dari PLTS hanya bisa saya manfaatkan saat pagi hingga sore hari saja," kata dia. Saat malam, lanjutnya, pasokan listrik pun harus dialihkan dari jaringan utama milik PLN. Kini kelebihan listrik produksi dari PLTS off grid miliknya pada siang hari dapat disimpan dalam baterai dan dimanfaatkan Yohanes sendiri pada waktu malam hari.

Setelah sepuluh tahun menjadi pengguna PLTS atap, Yohanes telah menginvestasikan uangnya sekitar Rp 200 juta untuk seluruh instalasi yang dipasang. Dia mengklaim sudah balik modal di tahun kedelapan sebagai pengguna PLTS. Menurut Yohanes, efisiensi dari pengeluaran biaya tagihan listrik PLN selama delapan tahun itu sudah setara dengan nilai investasi yang dikeluarkan untuk membangun PLTS atapnya. "Kini saya tinggal menuai keuntungan," kata Yohanes sambil membersihkan panel-panel suryanya yang umur pemakaiannya masih bisa sekitar sepuluh tahun lagi.

Sementara itu, seorang pengguna PLTS atap off grid dari Duren Sawit, Jakarta Timur, Riky memulainya dengan semangat untuk dapat berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih baik. "Saya memimpikan langit Jakarta dapat kembali biru, tidak berkabut polusi seperti belakangan ini," kata Riky. Langkah Riky untuk mewujudkan mimpinya dimulai sejak 2015. Dia mulai mengganti kendaraan bermotornya yang berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Merasa itu belum cukup, sejak 2017 dia pun juga memulai menjadikan PLTS atap sebagai sumber energi listrik di rumahnya. Bagi Riky, untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik harus dimulai dari dirinya sendiri baru selanjutnya dapat ditularkan ke orang lain. Setelah lima tahun menjadi pengguna PLTS atap, harapannya itu mulai membuahkan hasil. Beberapa tetangga rumahnya pun mulai mengikuti langkahnya. ***

Foto dan Teks: Aditya Pradana Putra

ARTIKEL

Menguatkan Solidaritas di AIS Forum

Oleh Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

FORUM Negara Pulau dan Kepulauan (AIS) memiliki keunikan tersendiri sebagai wadah kerja sama yang dibentuk di Indonesia melalui Deklarasi Manado pada pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum, 1 November 2018.

Jika forum internasional tertentu mengumpulkan negara berdasarkan skala ekonomi, misalnya negara-negara maju, kemudian berdasarkan regional atau memiliki kesamaan pandangan politik, maka tidak demikian dengan Forum AIS.

Forum AIS ini menyatukan negara-negara dalam konteks geografi dan tantangannya, sehingga, baik negara maju, negara berkembang, atau negara kurang berkembang yang tersebar di belahan Bumi, berkumpul dalam satu wadah kerja sama bernama Forum AIS.

Sebut saja Jepang, Inggris, Selandia Baru, sebagai negara maju hingga negara pulau, dengan luasan yang kecil dan kemungkinan terdengar asing di telinga masyarakat, di antaranya Niue, negara di Pasifik hingga Sao Tome and Principe yang berada di kawasan Afrika Tengah.

Sementara Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dan anggota G20, dengan memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, tentunya memiliki peran dan pengalaman yang perlu dibagi kepada negara lainnya. Jadi Forum AIS merangkul semua negara dari beragam latar belakang untuk duduk bersama membahas solusi dan dikerjakan bersama untuk masa depan negara pulau dan kepulauan.

Inilah yang menjadikan Forum AIS sebagai wadah yang unik, dengan tujuan yang jelas memperkuat kolaborasi negara pulau dan kepulauan terkait tantangan isu kelautan yang menjadi masalah global. Permasalahan global itu, di antaranya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut dan tata kelola maritim.

Untuk itu, diadakan KTT Forum AIS yang pertama di Bali pada 10-11 Oktober 2023 untuk menguatkan peran forum itu sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif. Selain itu, forum dengan jumlah partisipasi 51 negara itu juga menjadi wadah gotong royong dalam mendorong agenda masa depan, yakni tata kelola laut secara global.

ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Arsip foto - Wisatawan bermain kano menyusuri kawasan mangrove di Taman Hutan Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Kontribusi nyata

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mencatat Forum AIS bukan merupakan pertemuan bincang-bincang formalitas. Bukan juga forum yang mempertemukan sejumlah negara dengan janji-janji besar, namun tidak terealisasi dan belum menyentuh akar secara langsung.

Namun, Forum AIS lebih menekankan kontribusi konkret dalam menyelamatkan masa depan negara pulau dan kepulauan dari ancaman perubahan iklim yang menjadi permasalahan global. Upaya itu dilakukan dengan praktik ramah lingkungan untuk mendukung ekonomi biru yang bijak memanfaatkan laut, memberi dampak positif kepada masyarakat, dengan tidak merusak ekosistem laut. Contoh sederhana dari aksi nyata itu, di antaranya dilakukan melalui Forum AIS, yakni memberikan pelatihan membuat keramba apung di Fiji.

Keramba apung, sesuatu yang biasa di sektor perikanan Indonesia untuk budi daya ikan, ternyata merupakan peralatan pertama di kawasan Pasifik. Begitu juga pembuatan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan, ternyata menjadi hal yang baru di Madagaskar. Tak hanya itu, soal komitmen keberlanjutan Forum AIS mendengarkan dan mengimplementasikan kebutuhan negara pulau dan kepulauan.

Kantor regional pun sudah didirikan di Barbados untuk kawasan Karibia, Amerika Tengah, kemudian di Madagaskar untuk wilayah Samudera Hindia dan di wilayah Pasifik ada di Fiji. Sebagai salah satu negara inisiator Forum AIS, Indonesia memberikan komitmennya mengucurkan pendanaan 5 juta dolar AS, rencananya untuk periode 2022-2025 bagi forum itu.

Pada 2019, Indonesia sudah terlebih dahulu mengucurkan kontribusi sebesar 1 juta dolar AS untuk mendirikan sekretariat Forum AIS di Jakarta, implementasi kerja sama dan memperkuat kolaborasi antarnegara.

Membangun inovasi

Forum AIS juga menekankan perannya dalam membangun kapasitas sumber daya manusia dan inovator muda. Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) mengungkapkan Forum AIS mendukung ekspansi 500 startup atau pelaku UMKM rintisan berbasis digital. Bantuan itu disalurkan melalui pendanaan maupun pengembangan kapasitas, seperti pelatihan, lokakarya, hingga mempertemukan pelaku bisnis dengan calon mitra.

Dukungan kepada usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) dengan memfasilitasi lebih dari 1.500 penggerak UMKM, mulai dari perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam mengembangkan wirausaha.

Ada juga pemberian program beasiswa yang telah mencapai sekitar 430 ribu dolar AS, bantuan riset kepada peneliti dan akademisi mencapai 204.500 dolar AS dan modal awal sebesar 185 ribu dolar AS kepada berbagai startup mengembangkan solusi inovatif yang bisa menjadi percontohan antarsatu negara partisipan kepada negara lainnya.

Guna menguatkan peran Forum AIS sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif, serta sebagai wadah gotong royong untuk agenda masa depan tata kelola laut, keterlibatan anak muda menjadi salah satu bagian terpenting di forum itu.

Melalui AIS Youth Conference yang diikuti 26 delegasi dari 26 negara pulau dan kepulauan, ide dan inovasi anak muda itu dibutuhkan sebagai agen perubahan dalam upaya konservasi karena mereka merupakan generasi penentu masa depan. Misalnya untuk solusi penangkapan ikan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan energi baru terbarukan atau inovasi pengelolaan sampah.

Tak hanya itu, melalui Forum AIS lahir inovasi pemberdayaan dengan memanfaatkan aplikasi digital untuk pemantauan kesehatan mangrove (MonMang), konversi karbon padang lamun (SCC) dan juga pengembangan alat pemantauan kondisi kesehatan lautan, yakni Advanced Drifter GPS Oceanography (ARHEA).

Sebagai bagian kebersamaan, penemuan inovasi itu pun tidak hanya dinikmati sendiri, tapi dikenalkan kepada otoritas pesisir negara lain, misalnya aplikasi MonMang di Suva, Fiji untuk diujicobakan memantau lahan mangrove. Sesuai data pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), selain di Fiji, inovasi MonMang itu juga digunakan di Jerman, Jepang, Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lainnya.

Forum AIS yang memasuki usia lima tahun itu sejatinya memiliki potensi menjadi kekuatan besar, karena sebanyak 51 negara partisipan itu menguasai sepertiga wilayah laut dunia di bawah yuridiksi nasional negara pulau dan kepulauan itu. Suara dari 51 negara tersebut memiliki daya tawar, daya dukung, dan pastinya didengar dalam forum dunia, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk masa depan negara pulau dan kepulauan.

Ke depan kerja sama di Forum AIS perlu ditingkatkan dan dilanjutkan serta eskalasinya yang dibesarkan. Seperti pernyataan Presiden Joko Widodo yang bersama negara-negara Forum Archipelagic and Island States (AIS), Indonesia menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim.

Melalui berbagai forum inilah, Indonesia bersama komunitas internasional, termasuk negara-negara di bawah AIS, memiliki kontribusi besar untuk ikut memberikan solusi bagi berbagai persoalan global. ***